

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Cikal bakal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam diawali pada Tahun 1958, ketika di Banjarmasin berdiri Fakultas Agama Islam di bawah Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang resmi berdiri pada tanggal 21 September 1958. Ketuanya dijabat oleh H. Abdurrahman Ismail, M.A. dan H. Mastur Jahri, M.A. sebagai sekretaris. Setahun kemudian, pada tahun 1959, Fakultas Agama Islam ini berubah menjadi Fakultas Islamologi dan masih tetap di bawah Unlam. Pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Islamologi dan masih tetap di bawah Unlam. Pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin yang diketuai oleh K.H. Abdurrahman Ismail, M.A. sebagai upaya untuk penegerian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syariah, Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin mengutus H.M. Daud Yahya dan Abdurrisvaidi, B.A. untuk menghadap Menteri Agama K.H.M. Wahid Wahab di Jakarta guna memantapkan usaha yang sedang ditempuh.

Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syariah ini tidak sia-sia, karena dengan keluarnya keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 1960 tanggal 24 November 1960 yang ditandatangani sendiri oleh K.H.M. Wahid Wahab diresmikanlah penegerian Fakultas Syariah Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah *al-jam'iyah al-Islamiyah al-Hukumiyah* Yogyakarta Cabang Banjarmasin. Penegerian Fakultas Syariah ini terhitung mulai tanggal 15

Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Sebagai Dekannya ditetapkan K.H. Abdurrahman Ismail, M.A.

Walaupun Fakultas Islamologi Banjarmasin telah dinegerikan menjadi Fakultas Syariah *al-Ja@miah al-Isla@mi@yahoo al-Huku@mi@yahoo* Yogyakarta Cabang Banjarmasin, keinginan masyarakat Kalimantan Selatan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi agama Islam di daerah ini dirasakan belum sepenuhnya terpenuhi. Pada tanggal 20 September 1961 didirikan sebuah Universitas Islam Antasari (Unisan) yang merupakan gabungan Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Syariah di Kandangan dan pada tahun 1962 ditambah fakultas baru, yaitu Fakultas Publisistik di Banjarmasin. Pengumuman berdirinya Unisan dibacakan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Maksid, pada tanggal 17 Mei 1962 di lapangan Dwi Warna Barabai pada peringatan Hari Proklamasi ALSI Divisi IV pertahanan Kalimantan ke-13.

Berdirinya Unisan sebagai modal utama untuk mendirikan IAIN Antasari. Melalui proses perjuangan panjang dan berbagai pendekatan dengan Pemerintah Pusat, maka pada tanggal 20 November 1964 berdasar pada Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1964 diresmikan Pembukaan IAIN *Al Ja@m'iah* Antasari yang berkedudukan di Banjarmasin dengan Rektor pertama Jafry Zamzam dengan sekaligus menetapkan pimpinan-pimpinan fakultasnya masing-masing, yaitu: H. Abdurrahman Ismail, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Banjarmasin, H. Usman sebagai Dekan Fakultas Syariah Banjarmasin, H. Usman sebagai Dekan Fakultas Syariah Kandangan, H.M. As'ad sebagai Dekan Fakultas

Tarbiyah Barabai, dan H. Abdul Wahab Sya'rani sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Amuntai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1964 ini berarti Fakultas Syariah IAIN *Al Ja@m'iah* Antasari mempunyai dua cabang, yaitu Fakultas Syariah Banjarmasin dan Fakultas Syariah Kandangan. Fakultas Syariah yang berada di Banjarmasin sejak tahun 1961 sampai tahun 1965 menempati Kantor di jalan Lambung Mangkurat bersama tiga Fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Proses perkuliahan menggunakan gedung bekas Kodam X Lambung Mangkurat di jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada tahun 1965, Kantor fakultas Syariah dan sebagian perkualihan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di jalan Sungai Mesa Darat. SMIA dimaksud kemudian menjadi Sekolah persiapan IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Sebagai lembaga pendidikan yang masih muda, kelengkapan sumber daya manusia masih dirasakan sebagai masalah.<sup>1</sup>

Pada tahun 1966, tidak lama setelah peristiwa G. 30.S/PKI Kantor Pusat IAIN, termasuk Kantor Fakultas Syariah, menempati sebagian gedung sekolah Tionghoa/WNA RRC yang telah diambialih oleh pengusaha Daerah Kalimantan Selatan saat itu.

Pada Pelita I tahun 1969/1970 dan 1970/1971. IAIN Antasari membangun satu unit gedung kuliah bertingkat II seluas 1.480 m yang terdiri dari 12 ruang /lokal. Bangunan tersebut terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin, di

---

<sup>1</sup>IAIN Antasari, *Setengah Abad IAIN Antasari: Jalan Menuju Universitas Islam Negeri Antasari*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014), hlm. 45-48.

atas areal tanah seluas 10 ha (1.729 m) yang diperoleh dari Bantuan Pemerintah Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1971/1972, dibangun pula sebuah unit gedung untuk perkantoran seluas 500 m dengan 6 buah ruang (sekarang di atas tanah yang sama dibangun menjadi Pusat Sumber Belajar IAIN Antasari). Tidak lama setelah gedung perkantoran tersebut selesai dibangun, maka pada hari Kamis tanggal 30 Maret 1972, Kantor Pusat IAIN beserta fakultasnya, begitu pula Fakultas Syariah, dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin.

Pada tahun 1978 dilakukan integrasi konsentrasi kegiatan akademik Fakultas Syariah Kandangan ke Fakultas Syariah Banjarmasin. Sebagian dosen dan karyawan sebagaimana ikut pindah ke Banjarmasin dan sebagian pegawai Pemda keinstansinya. Barang-barang inventaris/aset, termasuk buku-buku perpustakaan sumbangan masyarakat, mahasiswa, dan para jemaah haji, sebanyak 2 truk turut diangkut ke Banjarmasin. Pegawai yang ditugaskan untuk membawa barang inventaris/aset tersebut adalah Murniansyah. Akan tetapi, sangat disayangkan data-data penting tertulis mengenai jumlah dosen, mahasiswa, dan alumni Fakultas Syariah Kandangan tidak diketemukan lagi kecuali mengandalkan ingatan para pegawainya.

Setelah Kantor Pusat dan seluruh kegiatan perkuliahan dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin, begitu juga fakultas-fakultas yang berada di daerah, termasuk Syariah Kandangan, diintegrasikan ke Banjarmasin, maka gedung-gedung dikembalikan kepada Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat.

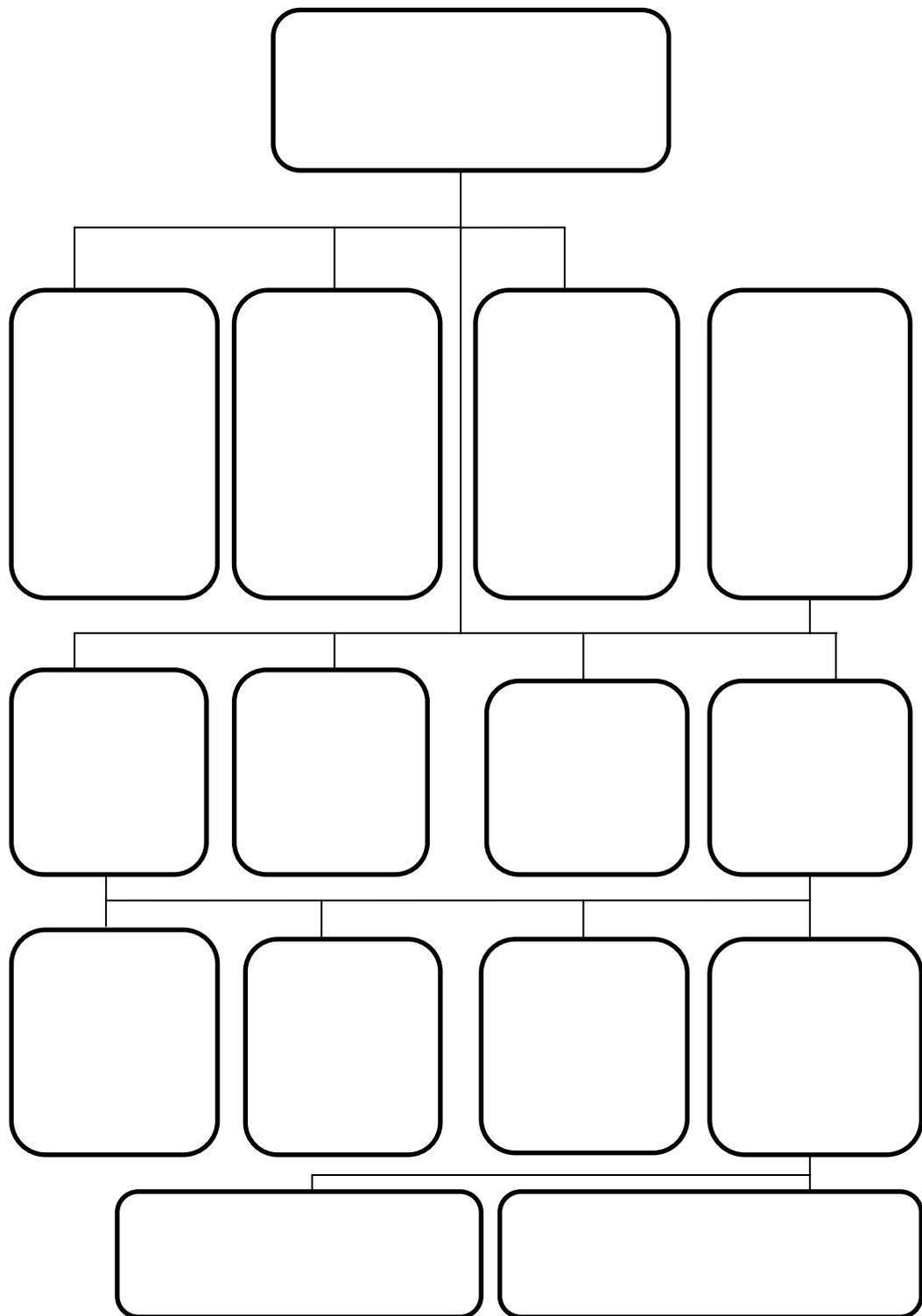
Dari perjalanan sejarah IAIN Antasari kelihatan bahwa Fakultas Syariah adalah fakultas yang paling awal berdiri di daerah ini. Fakultas inilah yang menjadi modal dikemudian hari untuk berdirinya IAIN Antasari di samping fakultas-fakultas swasta yang ada di daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 50-51.

Gambar 1.1

Susunan Organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



## B. Penyajian Data Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN

### Antasari Banjarmasin.

#### 1. Identitas Responden

##### a. Identitas responden

N0	Nama	Umur	Pend idika n	Peker- jaan	Mata kuliah	Alamat
01.	Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, MA	61	S 3	Dosen	Sejarah Peradaban Islam	Jl. Mahligai Komp. Ria Sajari Kab. Banjar
02.	H. Bahran, SH.MH.	56	S 2	Dosen	Ilmu Hukum	Jl. Trans Kalimantan Handal Bakti, Batola
03.	Imam Alfiannor, MHI.	42	S 2	Dosen	Fikih Siyasah	Jl.Veteran Km. 5,5 Banjarmasin
04.	Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH, M.Hum	42	S 3	Dosen	Hukum Tata Negara	Kayu Tangi Banjarmasin
05.	Arie Sulistyoko S.Sos, M.H	38	S 2	Dosen	Ilmu Politik	Jl. Sultan Adam

						Banjarmasin
06.	Sarmiji Asri, S.Ag, MHI	50	S 2	Dosen	Filsafat Hukum Islam	Jl. Belitung Darat, Gang Inayah, Banjarmasin
07.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum	55	S 3	Dosen	Ilmu Hukum	Martapura

Selama penelitian ini penulis telah mewawancarai 7 Orang Dosen dari dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, identitas responden dalam penelitian ini ialah biodata pribadi responden yang menjawab pertanyaan yang penulis ajukan , meliputi:

- 1) Usia responden yang dijadikan sampel di sini adalah responden yang berusia antara 38-42 sebanyak 3 orang dan responden yang berusia antara 50-61sebanyak 4 orang dan,
- 2) Pendidikan terakhir responden yang dijadikan sampel secara keseluruhan di sini adalah responden yang telah menyelesaikan pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 4 orang dan pendidikan strata 3 (S3) sebanyak 3 orang.

Data yang diperoleh yaitu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin berjumlah 77 orang. Penulis hanya mengambil sampel sebanyak 7 orang karena Dosen yang lain tidak begitu menguasai yang penulis teliti dan Dosen yang lainnya tidak bisa ditemui.

2. Persepsi responden tentang eksistensi partai politik Islam dan kendala dan tantangan partai politik Islam dalam Pemilu.

a. Menurut Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA

Eksistensi partai politik Islam sama dengan partai lain dalam pemilu selama memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu, yang telah diatur dalam perundang-undangan. kendala dan tantangan partai politik Islam dalam pemilu.

Kendala dan tantangan partai politik Islam dalam Pemilu, bapa Hafiz berpendapat, bahwa kendalanya adalah partai partai politik Islam masih belum mampu menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa partai Islam adalah partai harapan yang bisa mengubah kehidupan yang lebih baik, Masih kurangnya prasarana-prasarana perkembangan partai seperti perkantoran dan peralatan yang dibutuhkan partai Islam dan masyarakat Indonesia tidak selalu menepatkan agama sebagai prioritas, tapi mereka hanya melihat pada keuntungan yang di dapat dari partai politik.

Tantangannya, partai politik Islam harus melakukan pembenahan secara total terhadap semua komponen dan perangkat partai, menunjukkan secara eksplisit tentang kebenaran perjuangan mereka itu untuk Indonesia dan Islam, menunjukkan akhlak dan sifat Islami yang membedakan dengan partai yang lain dan

harus berusaha lebih keras mempersatukan internal dan eksternal antar sesama partai, agar mempunyai langkah dan gerak yang sama untuk memperjuangkan Islam.<sup>3</sup>

b. Menurut H. Bahran, SH.MH.

Eksistensi partai politik Islam baik dalam percaturan politik Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila penduduk beragama Islam memperjuangkan nilai-nilai Islam.

Mengenai Kendala dan tantangan Partai politik Islam, bapa Bahran berpendapat, Dalam 3 pemilu terakhir yaitu 2004, 2009, dan 2014. Partai politik Islam selalu kalah kalau dibandingkan dengan partai lain, kendalanya karena terlalu banyaknya partai islam sehingga suara mayoritas penduduk beragama Islam terpecah, akibatnya suara partai sangat Islam kecil dalam percaturan pemilu di Indonesia dan kendala lainnya ialah, sekalipun orang Islam mengaku beragama Islam, tapi urusan partai belum tentu memilih partai yang berbasis Islam, bisa memilih partai yang bukan berbasis Islam, bisa dilatarbelangi oleh kesamaan perjuangan atau dia merasa partai yang bukan berbasis Islam lebih banyak potensi memperjuangkan kepentingannya.

Tantangannya, bagaimana cara menyatukan partai islam ini lebih kecil lagi, dengan cara melebur partai islam menjadi satu partai Islam saja. selama itu bisa dilakukan Partai Islam, maka partai Islam akan bisa memenangi Pemilu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dilaksanakan hari Senin Tanggal 9 Mei 2017 Pukul 11.00 Wita.

<sup>4</sup>Wawancara dilaksanakan hari Jum'at Tanggal 12 Mei 2017 pukul 11.00 wita.

c. Menurut Imam Alfiannor, MHI.

Eksistensi partai politik Islam dalam pemilu adalah suatu hal yang semestinya ada karena partai politik salah satu fungsinya adalah penyalur aspirasi rakyat, karena rakyat Indonesia yang mayoritas Islam, kalau partai politik Islam ada maka adalah sesuatu hal yang wajar. Misi partai Islam salah satunya adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia, maka harus ada alatnya, salah satu alatnya adalah partai politik.

Menganai kendala dan tantangan partai politik Islam, bapa Imam berpendapat, kendala paling besarnya adalah bagaimana menarik pengikutnya (pemilih) di antara sekian banyak partai politik Islam yang berbasis Islam dan kendala kedua banyaknya partai Islam yang serupa. Sedangkan tantangannya sama besarnya dengan kendalanya dalam hal menarik minat orang baik yang ikut langsung menjadi anggota partai politik maupun sekedar partisipan ketika pemilu berlangsung.<sup>5</sup>

d. Menurut Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH, M.Hum

Eksistensi partai politik Islam dalam pemilu tidak hanya sebagai pengembira, tetapi justru bisa menjadi pendulang aspirasi masyarakat yang patut di perhitungkan karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Menganai kendala dan tantangan partai politik Islam, ibu Hayatun berpendapat, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam tidak sebanding dengan perolehan suara partai politik Islam dalam Pemilu, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor partai politik Islam sulit bersaing dalam pemilu.

---

<sup>5</sup>Wawancara dilaksanakan hari senin tanggal 15 Mei 2017 Pukul 08.05 wita.

*Pertama*, Partai politik Islam sulit menemukan isu-isu strategis yang mereka perjuangkan dalam pemilu. *kedua*, Terjadinya perpecahan dalam Partai Politik Islam. *Ketiga*, Persoalan korupsi yang melibatkan tokoh partai politik Islam.

Tantangannya, partai politik Islam harus membangun kembali visi-misi partai politik sesuai dengan strategis bangsa, Partai politik perlu terlibat dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik, membangun basis di tingkat lokal dan, memposisikan diri dalam menjawab masalah kebangsaan.<sup>6</sup>

e. Menurut Arie Sulistyoko S.Sos, M.H

Berbicara mengenai partai, bahwa di Indonesia sendiri di kenal beberapa tipe partai seperti partai yang berideologi agama khususnya Islam yang juga terbagi menjadi 2 yaitu yang berdasar Islam dimana asas dan ideologinya adalah Islam seperti PPP, PBB dan PKS serta partai yang berideologi pluralis namun berbasis masa Islam seperti PKB dan PAN, namun keseluruhan tersebut dapat di katakan sebagai partai Islam, kemudian partai Sekuler yang mana memisahkan antara agama dan negara atau dapat juga dikatakan partai yang berasaskan nasionalis atau kebangsaan seperti PDI-P, Demokrat dan lain-lain. Masing-masing partai tentu akan selalu mempertahankan eksistensinya di dalam kancah perpolitikan.

Mengenai kendala dan tantangan partai politik Islam dalam Pemilu. Bapa Arie berpendapat, Terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan partai Islam semakin terpuruk; pertama, perilaku masyarakat semakin sekuler dalam politik. Kedua, isuduan program yang

---

<sup>6</sup> Wawancara dilaksanakan hari jum'at tanggal 12 Mei 2017 pukul 10.07 wita.

kurangpopulis, kebanyakanpartaipolitikislammasihmengusungisu-isu agama sebagai program unggulanmereka. Ketiga, krisisfigur.PartaiIslam saatinitidakmemilikistokfigurpopulisdankharismatik yang mampumenjadi magnet elektoralbagipemilihsekaliguspemersatu.Keempat, partaiislamtidakmampumemperluasjangkauan basis konstituen. merekacenderungbertahandengandukungan captive market tradisionalnya yang semakintergerus. Kelima, kemajemukanparpolislam.

Tantangannya adalah seharusnya Partai Islam hendaknya mampu menyikapi keterbukaan ideologi partai Islam ini merupakan sesuatu yang realistis, menurut Bima Arya, bahwa partai-partai Islam untuk meningkatkan performa elektoral sangat ditentukan kemampuannya dalam merekonstruksi diri ditengah-tengah realitas psikis bangsa ini.

f. Menurut Sarmiji Asri, S.Ag, MHI

Eksistensi partai politik Islam di Indonesia baik itu pada orde lama, orde baru, orde reformasi sangat dibutuhkan, karena perlu warna-warna Islam dalam tata negara atau pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Maksudnya ada nilai-nilai Islam yang ikut mewarnai dalam pengelolaan pemerintahan atau politik di Indonesia, kalau tidak ada nilai-nilai Islam dalam pengelolaan pemerintahan, maka akan jauh melincing dari etika-etika yang baik, etika yang luhur dan budi perkerti, apabila etika tidak ada maka negara akan hancur.

Mengenai kendala dan tantangan partai politik Islam dalam Pemilu. Bapa Sarmiji berpendapat, kendalanya masih ada umat Islam yang pobia (takut) dengan partai politik Islam, karena mereka tidak siap menerapkan prinsipdan nilai-nilai

Islam dalam pengelolaan pemerintahan dan mereka ingin bebas tidak diatur oleh Islam, contohnya korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum Politik. Kendala lainnya adalah umat Islam belum bersatu yang masih banyak partai-partai Islam dan dari segi dana partai politik Islam minim. Tantangannya partai politik Islam harus tetap bersemangat untuk tetap eksis, kalau ingin mencapai kejayaan.<sup>7</sup>

h. Menurut Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

Eksistensi partai politik Islam dalam Pemilu sangat bagus dan harus ada, karena untuk mempersentasikan para jumlah pemilih muslim.

Mengenai kendala dan tantangan partai politik Islam dalam Pemilu. Bapa Fahmi berpendapat, kendalanya semua partai sama, ingin mencari kelauman masing-masing baik itu partai Islam ataupun bukan partai Islam. Tantangannya partai politik Islam harus tunjukkan kualitas diri, eksistensi dalam kebenaran, jangan membuat perbuatan tercela, bersatu dengan kejujuran, pegang teguh komitmen dengan keislamannya, persatuan bangsa dan tujuan bernegaranya. Apabila itu dikerjakan maka banyaklah pendukungnya.<sup>8</sup>

## **b. Analisis Data**

Berdasarkan penyajian data mengenai persepsi dosen Fakultas Syariah dan Menurut Dosen yang bernama, Bahran, Imam, Hayatun, Sarmiji dan Fahmi menyatakan bahwa eksistensi partai politik Islam dalam Pemilu sangat baik dan sangat dibutuhkan dalam percaturan politik di Indonesia , Ekonomi Islam

---

<sup>7</sup>Wawancara dilaksanakan hari senin tanggal 15 Mei 2017 pukul 09.30 wita.

<sup>8</sup>Wawancara dilaksanakan hari senin tanggal 15 Mei pukul 11.30 wita.

tentang eksistensi partai politik Islam dan kendala serta tantangan partai politik Islam dalam Pemilu dapat dijabarkan sebagai berikut:

karena salah satu fungsi partai politik adalah sebagai penyalur aspirasi rakyat, apalagi penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga dengan adanya keberadaan partai politik Islam dalam Pemilu dapat mempersentasikan jumlah pemilih yang muslim.

Sedangkan Menurut Dosen yang bernama Hafiz dan Arie, menyatakan bahwa eksistensi partai politik Islam sama dengan partai lain dalam pemilu selama memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu dan Masing-masing partai tentu akan selalu mempertahankan eksistensinya di dalam kancah perpolitikan.

Partai Islam atau lengkapnya partai politik Islam, perlu dipahami hakikatnya. Sebab banyak orang tidak bisa membedakan mana partai Islam dan mana yang bukan partai Islam. Ada partai yang mengaku partai Islam, padahal strateginya sangat pragmatis dan oportunistis, hanya mengejar ambisi kekuasaan seraya mencampakkan Islam.

Sebaliknya ada partai yang hakiki, tapi ditakuti umat, karena diopinikan atau dicitrakan buruk dengan berbagai stempel mengerikan, seperti cap teroris, fundamentalis, radikal dan sebagainya.<sup>9</sup>

Partai Islam menurut Abdul Qadim Zallum adalah partai yang berdiri di atas dasar Aqidah Islam, yang mengadopsi berbagai ide, hukum, dan solusi yang Islami, yang metode perjuangannya adalah metode perjuangan Rasulullah SAW.

---

<sup>9</sup>Fatahullah Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 128-129.

Sementara Ziyad Ghazzal mendefinisikan partai Islam adalah sebuah organisasi permanen yang beranggotakan orang-orang Islam yang bertujuan untuk melakukan aktivitas politik sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.

Dalam Indonesia kedudukan mendirikan partai politik sendiri dilandasi oleh pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dengan dasar UUD ini maka berbagai organisasi, perkumpulan dan termasuk dalamnya partai politik boleh didirikan oleh warganegara, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agama Islam juga berbicara tentang politik, Sebagaimana Allah SWT telah memerintah berdakwah kepada Islam, amar ma’ruf dan nahi@munkarserta mengoreksi para penguasa, maka Allah juga memerintah mereka untuk mendirikan partai politik di antara mereka, yang berdiri sebagai sebuah kelompok dakwah yang menyeru kepada kebaikan atau kepada Islam, *amar ma’ruf* dan *nahi@munkar* serta mengoreksi penguasa.<sup>10</sup> Allah SWT Berfirman:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون  
 “ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, kema’rufan dan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar: merekalah orang-orang yang beruntung” ( Q.S. Ali ‘Imra@n: 104)<sup>11</sup>

Artinya, wahai kaum muslimin, hendaklah kalian membentuk sebuah *jama@’ah*, yang melakukan dua tugas menyeru kepada Islam dan tugas tugas mengajak pada kema’rupan serta mencegah dari kemunkaran.

<sup>10</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit*, hlm. 355.

<sup>11</sup>Deperteman Agama RI, *Op.Cit*, hlm 50.

Ayat di atas menunjukkan hukum wajibnya mendirikan partai politik agar partai politik tersebut bisa menyeru kepada Islam, *amar ma'ru@f* dan *nahi@munkar* serta mengoreksi para penguasa terhadap semua tindakan dan tingkah laku yang mereka lakukan. Hadis Nabi Muhammad Saw juga menjelaskan tentang *amar ma'ru@f* dan *nahi munkar* yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ<sup>12</sup>

Dalam menjaga eksistensi *jama@'ah*, yaitu harus ada pemimpin yang wajib dita'ati, sehingga bisa melaksanakan fungsi *jama@'ah*. Karena syara' telah memerintah setiap kelompok yang mencapai jumlah 3 orang atau lebih agar mengangkat pemimpin yang memimpin kelompok tersebut.<sup>13</sup> Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَجَلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ<sup>14</sup>

Apabila sudah mendapatkan pemimpin, maka pemimpin itu harus dita'ati.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتَعْمَلَكُمْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَّةٌ<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Abi Al-Husaini Muslim Bin Al-hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, *Op.Cit*, hlm. 46-47. Lihat juga Abi Abdirrahman Syuaib Ali Al-Khurasani An-Nasa'i, *Op.Cit*. hlm. 81.

<sup>13</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit*, hlm. 355.

<sup>14</sup>Abi Daud Sulaiman Asy'ats al- Sijistani, *Op.Cit*, hlm. 241.

<sup>15</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 375. Lihat juga Abu Abdillah

Partai politik Islam, apabila ingin selalu eksis dalam Pemilu maka harus menjalankan tujuan dan fungsinya sebagai partai politik untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 10 pada ayat 1-3 tujuan partai politik adalah:

1. Tujuan umum partai politik adalah:
  - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945,
  - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan,
  - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus partai politik adalah:
  - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,
  - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan,
  - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berbangsa, dan bernegara.

3. Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.<sup>16</sup>

Sedangkan fungsi partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.<sup>17</sup> fungsi partai politik yang lain adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Politik,
2. Rekrutmen Politik,
3. Komunikasi Politik
4. Partisipasi Politik,
5. Pemandu Kepentingan,
6. Pengendalian Konflik,
7. Kontrol Politik dan,
8. Pembuat Keputusan Politik.

Dalam sejarahnya eksistensi partai politik Islam di mulai dari didirikannya Partai Islam yang disebut dengan Sarekat Islam (SI) oleh umat Islam pada tanggal 11 November 1912 di Solo partai ini berasal dari sebuah organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Samanhudi di kota yang sama pada tahun 1911. Pembentukan SI dilatarbelakangi oleh, Pertama, keinginan untuk melindungi diri dari persaingan yang semakin

---

<sup>16</sup>Tim Redaksi, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

<sup>17</sup>Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 116.

keras dalam bidang perdagangan batik terutama menghadapi Cina, serta sikap superioritas mereka terhadap orang Indonesia karena keberhasilan Revolusi Cina tahun 1911. Kedua, membentengi masyarakat Indonesia di Solo dari tekanan kaum bangsawan mereka sendiri dan kelompok Cina. Ketiga, sebagai instrumen umat Islam untuk membendung politik pengkristenan pemerintah Belanda dan kegiatan misionaris. Dengan demikian SI berhasil memadukan kepentingan ekonomi (yang berdimensi vertikal), dan sentimen etnik (yang berdimensi horizontal-partikular), dan sentimen keagamaan (yang berdimensi horizontal-general), penggabungan ini memberikan SI posisi yang kuat *vis-a-vis* pedagang Cina maupun pemerintah kolonial Belanda.<sup>18</sup>

Inilah hasil Pemilu, dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai pemilu yang terakhir yang diselenggarakan pada tahun 2014.

- Pemilu 1955

Tabel 2.1

Hasil Pemilihan Umum 1955

No.	Nama Partai	Jumlah suara sah	Persentase dari total suara sah	Jumlah kursi	Jumlah dalam DPRS (pada masa pembubaran)
01.	PNI	8.434.653	22,3	57	42
02.	Masyumi	7.903.886	20,9	57	44
03.	Nahdatul	6.955.141	18,4	45	8

<sup>18</sup>Zainal Abidin Amir, *Op.Cit*, hlm. 26-27.

	Ulama				
04.	PKI	6.176.914	16,4	39	17
05.	PSII	1.091.160	2,9	8	4
06.	Parkindo	1.003.325	2,6	8	5
07.	Partai Katolik	770.740	2,0	6	8
08.	PSI	753.191	2,0	5	14
09.	IPKI	541.306	1,4	4	-
10.	PERTI	483.014	1,3	4	1

Sumber: Prof. Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 434.

- Pemilu 1977-1997

Tabel 2.2

Hasil Pemilihan Umum Orde Baru 1977-1997

Partai	1977	1982	1987	1992	1997
GOLKAR	233	242	299	282	325
PPP	99	94	61	62	89
PDI	29	24	40	50	11
Total	360	360	400	400	425

Sumber: *Ibid*, hlm. 447.

- Hasil Pemilu 1999

Tabel 2.3

Perolehan suara dan kursi enam besar dalam pemilihan umum 1999

Nama Partai	Perolehan suara	persentase	Perolehan kursi	Persentase
PDIP	35.689.073	33,74	153	33,11
Golkar	23.741.749	22,44	120	25,97
PPP	11.329.905	10,71	58	12,55
PKB	13.336.982	12,61	51	11,03
PAN	7.528.956	7,12	34	7,35
PBB	2.049.708	1,93	13	2,81

Sumber: *Ibid*, hlm. 450.

- Hasil Pemilu 2004

Tabel 2.4

Perolehan suara dan kursi tujuh besar dalam Pemilu 2004

Nama partai	Perolehan suara	Persentase	Perolehan kursi	Persentase
Golkar	24.480.757	21,58	128	23,27
PDIP	21.026.629	18,53	109	19,81
PKB	11.989.564	10,57	52	9,45
PPP	9.248.764	8,15	58	10,54
Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57	10,36
PKS	8.325.020	7,34	45	8,18
PAN	7.303.324	6,44	25	4,54

Sumber: *Ibid*, hlm. 454

- Hasil Pemilu 2009

Tabel 2.5

Perolehan Kursi Partai Politik untuk DPR RI  
tujuh besar pada Pemilu 2009

No	Nama Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi
01.	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	150	26,79%
02.	Golkar	15.037.757	14,45%	107	19,11%
03.	PDIP	14.600.091	14,03%	95	16,96%
04.	PKS	8.206.955	7,88%	57	10,18%
05.	PAN	6.254.580	6,01%	43	7,68%
06.	PPP	5.533.214	5,32%	37	6,61%
07.	PKB	5.146.122	4,94%	27	4,82%

Sumber: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1169.html> (14 Juni 2017).

- Hasil Pemilu 2014

Tabel 2.6

Hasil perolehan kursi pada Pemilu 2014

No.	Nama Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi
01.	PDIP	23.681.471	18,95%	109
02.	Golkar	18.432.312	14,75%	91

No.	Nama Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah Kursi
03.	Gerindra	14.760.371	11,81%	73
04.	Partai Demokrat	12.728.913	10,19%	61
05.	PAN	9.481.621	7,59%	49
06.	PKB	11.298.957	9,04%	47
07.	PKS	8.480.204	6,79%	40
08.	PPP	8.157.488	6,53%	39
09.	Nasdem	8.402.812	6,72%	35
No.	Nama Partai			
10.	Hanura	6.579.498	5,26%	16

Sumber: <http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/14/241830/ini-daftar-perolehan-kursi-dpr-ri-tiap-parpol>.

Dari hasil Pemilu di atas menunjukkan bahwa eksistensi Partai Politik Islam dalam pemilu kurang menggembirakan. Mulai dari Pemilu pertama tahun 1955 sampai Pemilu masa reformasi, partai politik Islam tidak pernah menjadi yang pertama dalam Perolehan suara dalam pemilu.

Sedangkan penyajian data tentang Kendala dan tantangan Partai politik Islam dalam Pemilu, menurut Dosen yang bernama Bahran, Imam, Sarmiji, Arie menyatakan kendalanya partai politik Islam dalam Pemilu adalah banyaknya partai politik Islam itu sendiri, sehingga perolehan suara dalam pemilu sangat kecil karena terbagi dengan partai Islam yang lain.

Menurut bapa Hafiz menyatakan kendalanya adalah partai politik Islam masih belum mampu menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa partai Islam adalah partai harapan yang bisa mengubah kehidupan yang lebih baik, sedangkan menurut ibu Hayatun menyatakan, bahwa Partai politik Islam sulit menemukan isu-isu strategis yang mereka perjuangkan dalam pemilu.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan partai politik Islam sulit bersaing dalam Pemilu:

a. Mendayung di antara Demokrasi dan Syariah

Sebenarnya partai-partai Islam (berasaskan Islam) tidak jauh-jauh dari sebuah aktivitas yang dapat dikatakan mendayung di antara demokrasi dan syariah. Pada satu pihak hendak memperjuangkan syariah sebagai landasan formal partai, tetapi pada pihak lainnya menggunakan demokrasi sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan.

b. Bergulat dalam Arena yang sama

Partai-partai Islam bila boleh dikatakan sebenarnya bergulat pada arena yang sama yakni sama-sama merebut simpati dan hendak mendulang suara dari kaum muslim Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,56% total penduduk Indonesia. Hanya sayang, total penduduk muslim Indonesia agaknya kurang berminat pada partai-partai formalisme Islam, sehingga pada pemilu ke pemilu sejak era reformasi 1998 hingga 2009 tidak mendapatkan suara signifikan, bahkan cenderung menurun.

c. Berebut Tulang pada Muhammadiyah dan NU

Hal paling jelas yang dihadapi partai-partai Islam sebenarnya mereka berebut tulang yang sama, yakni kultur Muhammadiyah dan NU sebagai mayoritas muslim Indonesia. Memang jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 88,56% namun sebagian hanya berkisaran pada muslim Kartu Tanda Penduduk (muslim KTP), tetapi mayoritas yang dibidik partai Islam riilnya adalah dari kultur Muhammadiyah dan NU. Padahal diketahui partai yang berafiliasi atau mendekati diri dengan Muhammadiyah dan NU. Padahal diketahui partai yang berafiliasi atau mendekati diri dengan Muhammadiyah dan NU sangat beragam.

d. Berhadapan dengan kaum Abangan

Hal lainnya yang sebenarnya memberikan pada partai Islam adalah bahwa partai sebenarnya secara tidak langsung berhadapan dengan kaum abangan. Jika partai Islam mengagendakan formalisasi Islam, maka kaum abangan sekali pun memiliki KTP Islam tidak berada dalam koridor Islam Syariah (Islam formalis) sebagaimana oleh partai Islam dan kelompok lainnya di Indonesia. Hal ini menyebabkan partai Islam bukan hanya sulit berkomunikasi dan meraih simpati kaum abangan Indonesia, tetapi sekaligus dalam makna yang lebih sempit membuat “jarak” bahkan bermusuhan dengan kaum abangan, padahal jumlah mereka bisa dikatakan cukup banyak, sekali pun tidak sebanyak Muhammadiyah dan NU.

e. Bertabrakan dengan Kaum Bukan Muslim

Posisi partai Islam jelas sekali bertabrakan dengan kaum bukan muslim dalam agenda politiknya. Kaum bukan muslim tidak menghendaki formalisasi

syariah di Indonesia, bahkan mempertanyakan agenda syariah Islam di Indonesia, tetapi sebagian partai berasaskan Islam. Seperti PKS hendak menjadikan kaum bukan muslim sebagai pendukungnya. Aktivitas seperti ini sebenarnya sebuah aktivitas yang hanya membuang-buang energi karena jelas sekali bertabrakan alias kontraproduktif. Akan tetapi, partai islam karena kehilangan arah dan metode pendulangan suara dari kaum bukan muslim Indonesia. Ironi terjadi dengan gamblang di sini.

Tantangan partai politik Islam dalam Pemilu, menurut Dosen yang di wawancara, ada beberapa tantangan yang harus diperjuangkan oleh partai politik Islam, agar dapat bersaing dalam memenangkan Pemilu:

*Pertama*, Menurut bapa Hafiz menyatakan, partai politik Islam Harus melakukan pembenahan secara total terhadap semua komponen serta perangkat partai. *Kedua*, Menurut ibu hayatun menyatakan, Partai politik Islam harus membangun kembali visi-misi partai politik sesuai dengan strategis bangsa. *Ketiga*, Menurut bapa Arie menyatakan, seharusnya Partai Islam hendaknya mampu menyikapi keterbukaan ideologi partai Islam ini merupakan sesuatu yang realistis. *Keempat*, menurut bapa Fahmi menyatakan, partai politik Islam harus tunjukkan kualitas diri, eksistensi dalam kebenaran, jangan membuat perbuatan tercela, bersatu dengan kejujuran, pegang teguh komitmen dengan keislamannya, persatuan bangsa dan tujuan bernegara.

*Kelima*, menurut bapa Imam menyatakan, partai politik Islam harus bisa menarik minat orang, baik yang ikut langsung menjadi anggota partai politik maupun sekedar partisipan ketika pemilu berlangsung. *Keenam*, menurut

bapaBahran menyatakan, bagaimana cara menyatukan partai islam ini lebih kecil lagi, dengan cara melebur partai islam menjadi satu partai Islam saja. *Ketujuh*, menurut bapa Sarmiji menyatakan, tantangannya partai politik Islam harus tetap bersemangat untuk tetap eksis, kalau ingin mencapai kejayaan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi partai politik Islam dalam Pemilu sangat baik dalam percaturan politik Indonesia, apalagi penduduk Indonesia adalah mayoritas Islam. Tetapi secara faktanya partai politik Islam dari dulu sampai sekarang masih sulit bersaing untuk menjadi pemenang dalam pemilu. hal tersebut dikarenakan banyaknya partai Islam yang ikut serta dalam Pemilu sehingga perolehan suara menjadi terbagi dan sekalipun penduduk Indonesia adalah mayoritas Islam, tetapi urusan partai belum tentu memilih partai yang berbasis Islam, hal tersebut bisa dilatarbelakangi oleh kesamaan perjuangan atau dia merasa partai yang bukan berbasis Islam lebih banyak potensi memperjuangkan kepentingannya. Sedangkan tantangannya bagi partai politik Islam ialah bagaimana partai Islam itu sendiri bisa menunjukkan dirinya sebagai partai yang bisa membuat perubahan yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia.